

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui dan menjunjung tinggi suatu aturan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta aturan hukum positif yang berlaku, yang dimana sebagai negara yang taat akan hukum dan menganut asas persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum atas setiap individu atau yang kita kenal dengan asas *equality before the law*, tentunya sudah menjadi suatu kewajiban negara untuk menjaga dan melindungi setiap hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia tanpa melihat dari latar belakang etnis, suku, warna kulit, politik, status finansial, dan agama yang diyakini.

Dalam hal ini negara juga memiliki kewajiban dalam menjaga dan melindungi setiap hak hukum yang melekat dan dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia melalui penegakan hukum secara menyeluruh dan merata kepada para pihak yang tersandung suatu permasalahan hukum, yang dalam hal ini dimaksudkan kepada para pihak tersangka dari suatu pelanggaran tindak pidana dan para pihak korban dari suatu pelanggaran tindak pidana tersebut, yang kemudian diimplementasikan di berbagai tahapan sistem litigasi maupun non-litigasi yang mengakui persamaan perlindungan hak di hadapan hukum, yang dimana hal ini tentunya dapat melahirkan sebuah keselarasan dan keadilan sebagaimana tujuan hukum dibentuk.

Dalam memberikan pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap setiap hak hukum yang mengandung persamaan dalam hal etnis, suku, warna kulit, politik, status finansial, dan agama, maka dengan hal ini negara telah menuangkan suatu bentuk peraturan konstitusi ke dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan sebagai produk hukum Negara Indonesia yang salah satunya tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHAP. Dengan adanya produk hukum yang melindungi setiap hak warga negara tersebut maka perlindungan hak di hadapan hukum atau perlindungan hak “secara hukum” dapat diberikan dan ditujukan untuk menjaga hak-hak dasar para pihak yang tersandung suatu permasalahan hukum sebagaimana hakikatnya sebagai manusia biasa, dan untuk menghindari perlakuan yang semena-mena pada saat mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat berjalannya proses hukum yang berlaku pada negara yang menganut paham *rule of law*.¹

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termaktub di dalam Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP telah mengatur mengenai proses penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat penyidikan yang ditujukan kepada seseorang yang telah berstatus tersangka, dengan kategori khusus yaitu tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang terancam dengan pidana

¹ R. Subekti, 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 9.

penjara di atas 5 (lima) tahun, yang dimana tersangka tersebut tergolong sebagai masyarakat tidak mampu (miskin), dan tersangka tersebut tidak mempunyai penasehat hukumnya sendiri.²

Bila meninjau maksud dari ketentuan peraturan diatas, maka tersangka dengan kategori tersebut berhak mengetahui terlebih dahulu perihal hak hukum yang dimilikinya sebelum dimulainya suatu rangkaian pemeriksaan terhadap dirinya pada proses penyidikan, dan tersangka tersebut diwajibkan untuk mendapatkan hak hukumnya berupa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum secara cuma-cuma selama proses penyidikan sebagaimana yang telah disediakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian yakni penyidik.³

Ketentuan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat penyidikan berupa pendampingan hukum bagi tersangka yang ditinjau dari Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP ini menjadi suatu syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu karena ketentuan ini termaktub dengan jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan pedoman dalam proses penyelesaian perkara pidana yang menjadi suatu syarat formil serta menentukan sah atau tidaknya sebuah perkara tersebut untuk lanjut ke tahapan peradilan selanjutnya.⁴ Selain itu

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 Ayat (1)

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 114

⁴ Setiawan, *Perkuliahan Hukum Acara Pidana Semester 5*.

pada Pasal 56 Ayat (1) KUHAP telah terdapat suatu frasa penekanan yakni kata “wajib” itu sendiri yang dimana kata wajib tersebut sangat jelas dan tegas, yang tentunya memiliki makna *Imperatif*.

Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya juga menjelaskan bahwasannya pendampingan hukum ini wajib diberikan serta dilaksanakan dari tingkatan pemeriksaan di penyidikan hingga ke berbagai tahapan peradilan selanjutnya.⁵ Bilamana terjadi ketidaksesuaian antara prosedur penyidikan di lapangan dengan peraturan terkait yang menyebabkan seseorang tersangka dengan kategori yang dimaksud menjadi tidak didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana hak yang seharusnya di dapatkannya, maka seharusnya hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan bertentangan dengan hukum formil yaitu hukum acara yang telah diatur di dalam KUHAP, yang dimana dalam hal ini telah bertolak belakang dengan konsep efektivitas hukum.

Menurut konsep efektivitas, efektivitas mengandung arti keefektifan dari suatu pengaruh yang menghasilkan keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, dan dalam membicarakan keefektifan hukum tentunya tidak terlepas dari penganalisisan karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁶ Ketika

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 114, *Op.Cit*.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetak Ketiga, Citra Aditya, Bandung, 2013, Hal. 67.

berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁷

Dengan telah adanya peraturan yang secara jelas mengatur mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat penyidikan berupa pendampingan hukum oleh Advokat/Penasehat Hukum bagi tersangka sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, seharusnya tersangka dengan kategori yang dimaksud dapat mendapatkan hak hukumnya berupa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum secara cuma-cuma pada proses pemeriksaan di tingkatan penyidikan yang telah disediakan pihak penyidik kepolisian sebagaimana dari maksud peraturan terkait. Namun berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh penulis, menunjukkan masih dapat ditemukannya tersangka yang terancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun yang tidak tercapai hak hukumnya pada saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana seharusnya menurut Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.

Mengutip permasalahan pada kanal berita online yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang penulis angkat, yang menjelaskan

⁷ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetak Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 375.

bahwasannya dua orang tersangka dengan inisial “GM” dan “AS” yang menolak untuk didampingi oleh advokat/penasehat dalam proses penyidikan merupakan dua orang tersangka yang terlibat dalam kasus pembiusan dan pemerkosaan atas korban “EW” yang terjatir pasal berlapis yaitu Pasal 328, 285, 286, dan 290 KUHP, dan diancam dengan pidana penjara selama 21 tahun.⁸

Berdasarkan rekap data penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat penyidikan yang telah diperoleh penulis dari Sat Reskrim Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kota Malang menunjukkan bahwasannya masih dapat ditemukan beberapa tersangka yang terancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun yang tidak didampingi oleh penasehat hukum pada tahapan penyidikan, sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan secara cuma-cuma apabila merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termaktub pada Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.

Terdapat sebuah problematika mengenai efektivitas hukum dikarenakan bagaimana suatu syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu yang secara prosedur “wajib” disampaikan dan diberikan oleh pihak penyidik kepada tersangka, namun mengapa dalam prakteknya masih dapat ditemukan tersangka yang pada saat proses penyidikan terhadap dirinya di Sat Reskrim Unit Pidum Polres Kota Malang tidak didampingi oleh

⁸ Dharmadji S, *Diancam 12 Tahun Penjara Tersangka Tolak Pengacara*, www.merdeka.com, diakses 4 April 2019.

penasehat hukum sehingga amanat undang-undang yang mengatur perihal tersebut masih belum dapat berjalan dengan efektif.

Idealnya seorang tersangka yang terancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih dari itu berhak mengetahui dan mendapatkan bantuan hukum atas dirinya berupa di dampingi oleh penasehat hukum sejak pada tingkat penyidikan secara wajib dan cuma-cuma untuk menjaga hak-hak dasarnya dan mencegah perbuatan semena-mena penyidik dalam menggali keterangan.

Bila ditinjau dari segi etimologisnya, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang dimana memiliki arti yakni berhasil atau dalam pengertian lain yakni sesuatu hal yang dilakukan berhasil dengan baik. Bila merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau suatu peraturan.⁹ Pada dasarnya kata efektivitas itu memiliki makna yakni sejauh mana tingkat keberhasilan atau kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan, yang dimana berarti efektivitas menjadi suatu tolak ukur tercapai atau tidaknya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal. 284.

tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”¹⁰ Menurut Anthoni Allot, Efektivitas Hukum adalah sebagai berikut :

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.¹¹

Maka di dalam suatu peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum dari tingkatan yang paling tinggi hingga yang paling rendah memiliki kesamaan tujuan yaitu agar masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum dapat secara bersama-sama mematuhi dan melaksanakan amanat dari suatu peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum dengan konsisten dan tanpa membedakan demi tercapainya suatu keselarasan.

Suatu peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif bilamana bunyi undang-undangnya jelas tanpa perlu penafsiran, aparaturnya penegak hukumnya dapat melaksanakannya dengan konsisten, dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari suatu peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum tersebut. Namun

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, Hal. 7.

¹¹ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hal. 303.

berdasarkan data lapangan di atas dapat menunjukkan bahwasannya penerapan Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tersebut masih belum dapat terlaksana dengan maksimal sehingga fungsi, tujuan, dan apa yang dicita-citakan di dalam suatu perundang-undangan tersebut tidak sepenuhnya tercapai dengan baik sehingga masih adanya beberapa masyarakat yang tidak dapat menikmati dampak positif dari peraturan tersebut dan menimbulkan suatu permasalahan hukum mengenai efektivitas hukum.

Sehubungan dengan permasalahan mengenai efektivitas pendampinan hukum pada tingkat penyidikan di Sat Reskrim Unit Pidum Polres Kota Malang ini, Bustanul Arifin berpendapat yang mengatakan bahwa dalam negara yang berlandaskan pada hukum, maka mengenai berlaku efektif atau tidak efektifnya suatu hukum didukung oleh tiga pilar, yaitu *yang pertama* adalah lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan, *yang kedua* adalah peraturan hukum yang jelas sistematis, dan *yang ketiga* adalah kesadaran hukum masyarakat tinggi.¹²

Pendapat selanjutnya oleh Soerjono Soekanto juga tidak jauh berbeda yang menurut beliau di dalam permasalahan tersebut tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu *yang pertama* adalah karena peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum yang

¹² Raida L Tobing dkk, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hal 11.

kabur atau tidak jelas, *yang kedua* adalah aparaturnya penegak hukum yang tidak konsisten dalam melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum tersebut, dan *yang ketiga* adalah masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum tersebut.

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwasannya bila ingin menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum, harus didasari pada lima hal yaitu *yang pertama* adalah faktor hukum, *yang kedua* adalah faktor penegak hukum, *yang ketiga* adalah faktor masyarakat, *yang keempat* adalah faktor sarana dan prasarana, dan *yang kelima* adalah faktor kebudayaan¹³

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.¹⁴

Dengan adanya bentuk produk perlindungan hukum berupa KUHAP yang kemudian dituangkan pada Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 5.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 53.

(1) KUHAP yang menjaga hak terhadap tersangka lewat penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, yang dimana perihal tersebut tentunya menerapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan dan bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pengakuan. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, hak tersebut tegas dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945) khususnya Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.¹⁵

Jaminan konstitusional tersebut lalu dijabarkan baik melalui undang-undang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi/disahkan Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14 Ayat (3) huruf d UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang intinya menyatakan, “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan hal ini, jelas sudah, bahwa bantuan hukum pada tingkat penyidikan merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D Ayat (1).

¹⁶ Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, *Akibat Hukum Jika Hak Tersangka Dan Terdakwa Atas Bantuan Hukum Tidak Terpenuhi*, <http://lbhmawarsaron.or.id>, diakses 04 April 2019.

Terdapat Yurisprudensi yang telah mengatur mengenai perihal tersebut diantaranya adalah yang pertama terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, “Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”¹⁷, yang kedua terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa bila tak didampingi oleh penasehat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasehat hukum.”¹⁸

yang ketiga terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan :

Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.¹⁹

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011.

Berdasarkan yurisprudensi yang tertera pada penjelasan diatas, sudah sangat jelas ketentuan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat penyidikan berupa pendampingan hukum oleh penasehat hukum kepada tersangka yang terancam pidana penjara diatas 5 tahun yang harus diberikan pada saat tingkat penyidikan yang dimana bila hal ini tidak dijalankan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tersebut maka akan berimbas kepada dakwaan, tuntutan, dan putusan yang seharusnya menjadi tidak sah hukumnya karena proses awalnya sudah menyalahi aturan yang berlaku.

Maka sehubungan dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau kesenjangan antara teori dengan praktek lapangan yang kemudian melahirkan suatu permasalahan mengenai efektivitas hukum pada proses penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Sat Reskrim Unit Pidum Polres Kota Malang berupa pendampingan hukum bagi tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat fenomena hukum tersebut kedalam suatu penulisan skripsi dengan judul :

“EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI PASAL 114 KUHAP *JUNCTO* PASAL 56 AYAT (1) KUHAP (Studi di Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis akan menuangkan ide penulisan ke dalam beberapa poin permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Faktor Yang Menyebabkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Berupa Pendampingan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang Masih Belum Dapat Berjalan Dengan Efektif?
2. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang Agar Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Berupa Pendampingan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Dapat Berjalan Dengan Efektif?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan mengenai permasalahan terhadap efektivitas hukum pada proses penyelenggaraan bantuan hukum bagi tersangka yang terancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun di Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang berupa pendampingan hukum pada tingkat penyidikan yang masih belum berjalan dengan efektif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;
2. Mengetahui tentang upaya yang dapat dilakukan oleh Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang dalam mengatasi permasalahan

terhadap efektivitas hukum pada proses penyelenggaraan bantuan hukum bagi tersangka yang terancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun berupa pendampingan hukum pada tingkat penyidikan yang masih belum berjalan dengan efektif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;

3. Mengetahui perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum yang secara khusus terlihat dari jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara bunyi Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan praktek di lapangannya melalui studi efektivitas hukum yang yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum.²⁰

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan dan memiliki manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut :

1. Teoritis

Manfaat yang diharapkan adalah untuk memberikan sumbangsih positif bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam kajian teori atau sumber referensi di

²⁰ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, Hal. 47-48.

masa mendatang. Serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mengapa begitu pentingnya suatu proses penyelenggaraan bantuan hukum bagi tersangka yang terancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun berupa pendampingan hukum pada tingkat penyidikan.

2. Praktis

- a. Bagi Penulis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa mengetahui faktor penyebab dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai efektivitas hukum ini langsung dari aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat penyidikan. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi penulisan hukum sebagai syarat akhir untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dibidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Bagi Kepolisian, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kritik serta masukan dalam rangka meningkatkan kinerja serta fungsi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum bagi tersangka di tingkat penyidikan menurut Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP agar lebih baik lagi dikemudian hari sehingga permasalahan mengenai efektivitas

pendampingan hukum pada tingkat penyidikan di Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang tidak terjadi lagi;

- c. Bagi Masyarakat, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta kesadaran hukum pada masyarakat mengenai pentingnya untuk menuntut hak hukum yang dimiliki seorang tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, sehingga dimasa mendatang ketidapahaman masyarakat atas proses penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat penyidikan berkurang dan dapat turut menunjang keefektifan dari berlakunya Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP khususnya di Kota Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi dalam teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum acara pidana serta mampu memberikan penjelasan mengenai faktor apa saja dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mengenai tidak efektifnya Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tentang

penyelenggaraan bantuan hukum berupa pendampingan hukum bagi tersangka di Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan bagi seluruh mahasiswa dalam memperluas wawasan dan pengetahuan terhadap proses penyelenggaraan bantuan hukum berupa pendampingan hukum pada tingkat penyidikan bagi tersangka dengan kategori yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.

F. Metode Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang dimana penulis akan melakukan penelitian hukum yang bersifat sosiologis, dengan maksud penulis akan terjun ke lapangan untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang menyelenggarakan fungsi pemberian bantuan hukum di tingkat penyidikan yaitu para penyidik di Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang.

Dalam penelitian hukum ini penulis meneliti suatu fenomena hukum berdasarkan pengamatan dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait, yang kemudian akan penulis hadapkan dengan konsep hukum yang telah ada, sehingga disini penulis dapat menggambarkan mengenai bagaimana kondisi permasalahan yang diangkat seperti fenomena hukum mengenai efektivitas pendampingan hukum pada tingkat penyidikan yang didasarkan oleh hasil penelitian penulis.

Penelitian hukum dengan jenis yuridis empiris ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dengan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat. Jadi dalam posisi ini penulis akan melakukan studi penelitian terhadap efektivitas pendampingan hukum bagi tersangka sejak pada tingkat penyidikan yang akan didasarkan pada keadaan sesungguhnya antara hukum/peraturan yang ada dengan praktik yang ada di masyarakat dengan menggali fakta-fakta dan data yang diperlukan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya akan menuju pada suatu jawaban dari permasalahan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang memiliki maksud yaitu penulis akan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau para subyek hukum yang berwenang dalam penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat penyidikan yaitu para Penyidik di Sat

Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang dengan tujuan memperoleh informasi, data, dan pengetahuan hukum empiris (secara langsung) terkait problematika yang sedang diangkat oleh penulis yaitu mengenai efektivitas pendampingan hukum pada tingkat penyidikan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis dilakukan di Polres Kota Malang bagian Reserse Kriminal Unit Pidana Umum karena berdasarkan rekap data kasus dimana dapat ditemukannya tersangka yang terancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun yang tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan pada Unit Pidana Umum.

Selain itu dengan dasar pertimbangan penulis bahwasannya Reserse Kriminal Unit Pidana Umum di Polres Kota Malang juga mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrim yang melingkupi penyelenggraan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, yang dimana dari hal tersebut dapat ditemukannya suatu permasalahan mengenai efektivitas hukum berupa sebagaimana hak hukum yang seharusnya didapat apabila ditinjau dari Pasal 114 KUHAP *Juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dimana sumber pertama tersebut memiliki keterkaitan atau keterlibatan secara langsung sebagai subyek hukum dari suatu permasalahan yang sedang diangkat oleh penulis yaitu mengenai efektivitas pendampingan hukum pada tingkat penyidikan.

Data primer tersebut diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara terhadap para Polisi di bagian Sat Reskrim Unit Pidana Umum Polres Kota Malang diantaranya adalah:

- i. IPDA Suyanto S.A.P., M.H., Kanit Pidana Umum (Pidum) di Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Polres Kota Malang;
- ii. AIPDA Galih Muhammad Hamdah S.H., Penyidik di Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kota Malang;
- iii. AIPDA Abdillah S.H., Sumbag Hukum di Polres Kota Malang;
- iv. AIPDA Dadang Firdianto S.H., Sumbag Hukum di Polres Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder itu sendiri mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Sumber data sekunder penelitian hukum ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka terhadap segala bentuk literatur maupun peraturan hukum yang ada mengenai bantuan hukum berupa pendampingan hukum bagi tersangka sejak pada penyidikan yang diantara lainnya adalah:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 114;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 56 Ayat (1);
- iii. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- iv. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 Ayat (4);
- v. Dan beberapa buku, literatur, maupun jurnal lainnya yang berkaitan dengan hak hukum yang dimiliki tersangka serta peraturan formil tentang pendampingan hukum pada tingkat penyidikan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis. Metode pengumpulan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya yaitu sebagai pihak yang mencari informasi dari suatu permasalahan, dengan narasumber yaitu sebagai pihak yang diyakini berkompeten memiliki informasi terhadap suatu permasalahan terkait, yang dimana kegiatan tanya jawab tersebut dilakukan secara langsung dan bertatap muka yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi yang akurat secara lisan.

Dalam kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi dan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diangkat, maka penulis akan menggali informasi terhadap narasumber yang dianggap berkompeten secara langsung dengan wawancara terhadap para Polisi di bagian Sat Reskrim Polres Kota Malang diantara adalah:

- i. IPDA Suyanto S.A.P., M.H., Kanit Pidana Umum (Pidum) di Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Polres Kota Malang;
- ii. AIPDA Galih Muhammad Hamdah S.H., Penyidik di Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Kota Malang;
- iii. AIPDA Abdillah S.H., Sumbag Hukum di Polres Kota Malang;
- iv. AIPDA Dadang Firdianto S.H., Sumbag Hukum di Polres Kota Malang.

Berdasarkan uraian diatas, maka kegiatan wawancara menjadi salah satu cara dalam mengumpulkan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris yang dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menghasilkan sumber data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh penulis, sehingga akan diperoleh data absolut yang sah, tepat, lengkap, dan akurat. Hasil dari suatu dokumentasi dapat berwujud dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara dengan menyusun data-data yang telah terkumpul yang kemudian di gambarkan secara terstruktur, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

keadaan sebenarnya. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²¹

G. Sistematika Laporan Penelitian

Berikut adalah gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang terbagi dari 4 (empat) yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis dan diteliti yang meliputi teori hukum dan pendapat ahli hukum, pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan diangkat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Hal. 48.

Dalam bab ini memuat tentang analisis terkait fakta lapangan yang telah didapat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan segala sesuatu yang termuat pada BAB II.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis serta saran penulis yang perlu disampaikan terkait dengan masalah yang diangkat.

